

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2008, sekelompok mahasiswa Ukraina yang terdiri atas Anna Hutsol, Inna Shevchenko, Oksana Sashko, dan Roman Zviazsky, yang tinggal di kota Khmelnytskyi, membentuk sebuah kelompok protes feminis. Kelompok ini dikenal sebagai Femen, yang sejak itu mendapat perhatian luas di tingkat global karena protes-protes topless yang kontroversial. Pada awalnya, protes-protes tersebut umumnya berupa pertunjukan teater jalanan, tetapi kini lebih sering berupa pertunjukan flash-mob yang disebarkan melalui internet. Anggota-anggotanya, yang sebagian besar berusia dua puluh hingga tiga puluhan tahun, terdiri dari dua belas anggota aktif dan lebih dari empat ratus anggota non-aktif yang terdaftar di situs web mereka.

Femen awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pariwisata seks di Ukraina, namun saat ini mereka mengarahkan pertunjukan mereka pada berbagai isu yang mereka anggap bersifat patriarkal. Di Ukraina, Femen dikenal sebagai kelompok aktivis yang paling menonjol. Meskipun protes publik yang teatrikal bukanlah hal yang baru di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, protes feminis topless hampir tidak pernah terjadi di sana sebelumnya. Pemimpin Femen, Anna Hutsol, seperti banyak anggota Femen lainnya, berasal dari kelas menengah Ukraina dan menggunakan bahasa Rusia dan Ukraina secara bergantian. Dia telah bekerja di bidang pemasaran dan juga telah menerima pelatihan dari program kepemimpinan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Sebelum memperoleh kantor di Kyiv pada tahun 2011, anggota Femen secara teratur bertemu untuk melakukan sesi perencanaan, wawancara, dan kegiatan lainnya di sebuah kafe milik pribadi di dekat Khreschatyk yang bernama Café Cupidon. Pada tahun 2012, kelompok tersebut membuka kantor di Berlin dan Paris. Hutsol telah menyatakan bahwa sumber utama dukungan keuangan mereka berasal dari donor pribadi (Hutsol 2011). Juga dicatat bahwa kelompok ini telah didanai oleh seorang musisi bernama DJ Hell dan pemilik perusahaan media KP Media Holding, Jed Sunden (Prymachyk 2010).

Sejak pembentukannya, ketersebaran Femen awalnya di jalanan dan surat kabar Ukraina, kemudian di luar negeri, dan akhirnya hampir sepenuhnya online - telah berfungsi, dalam banyak hal, untuk menciptakan ilusi kehadiran global melalui meme-media. Mulai dari Oktober 2011 sampai dengan Januari 2015, Femen menyelenggarakan sekitar enam puluh aksi jalanan di luar Ukraina. Mereka muncul dalam acara-acara yang penting secara global termasuk pertemuan pemimpin G8, pertemuan di Vatikan, dan sidang pengadilan di Quebec mengenai tampilan publik simbol-simbol agama. Negara-negara di mana anggota inti Femen atau perempuan yang terafiliasi dengan kelompok tersebut mengadakan aksi protes-performans termasuk Belarus, Rusia, Polandia, Prancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Swiss, Spanyol, Portugal, Turki, Tunisia, Brazil, India, dan Kanada (Jessica Zychowicz 2015). Tema-tema protes internasional Femen meliputi kebijakan pelecehan seksual di Piala Euro, kebebasan pers dan sensor, sikap komite Olimpiade terhadap hukum Islam, pemakaian cadar, perdagangan

manusia, dan sikap Gereja Katolik terhadap pernikahan sejenis (Jessica Zychowicz 2015).

Di era globalisasi ini citra mereka secara online telah menghasilkan percakapan yang luas tentang feminisme di mana pertunjukan topless mereka telah menjadi titik api untuk konflik, solidaritas, dan kegelisahan yang lebih dalam tentang gender, pembebasan seksual, dan identitas nasional. Memberikan platform untuk perdebatan tentang isu-isu sosial merupakan tindakan politik itu sendiri, dan tahap pertama dalam menyampaikan berbagai tuntutan. Dalam kasus Gerakan Femen, media membentuk desain pesan-pesan mereka, yang telah berubah seiring waktu sejak pendirian mereka hampir satu dekade yang lalu, karena mereka beradaptasi dengan tempat dan konvensi budaya media daring. Perbedaan ini penting untuk melihat bagaimana Gerakan Femen mendapatkan perhatian media. Sikap politik ambigu kelompok ini "melawan segala bentuk kediktatoran dan agama," memberikan mereka strategi retorika yang ada sejak awal pembentukan mereka untuk mengaitkan citra mereka dengan berita-berita tentang penyebab yang tidak langsung terkait dengan feminisme dan hak-hak perempuan (Femen 2009).

Femen mengklaim telah mengembangkan bentuk perlawanan baru terhadap kekuasaan patriarki, yaitu 'sextremism' atau dengan kata lain menggunakan 'payudara sebagai senjata', dan tubuh sebagai pembawa pesan politik. Konteks di mana Femen beroperasi adalah konteks global tanpa batas dari media massa dan internet. Dalam konteks ini, kritik feminis gelombang ketiga telah berkembang melawan objektifikasi tubuh perempuan di mana 'hotness

becomes cultural currency” (Sobchack dalam Woodward et al, 2009) dan gambar-gambar yang sangat seksual atau pornografi ada di mana-mana (North, 2004).

Dengan semua rangkaian aksi yang telah Femen lakukan maka sebenarnya gerakan ini dapat dikatakan menganut pemahaman feminis radikal. Feminis radikal beranggapan bahwa keterasingan yang dialami kaum perempuan disebabkan oleh faktor politik sehingga transformasi personal mengakibatkan terhadap tindakan radikal. Feminis mahzab radikal ini mengatakan, bahwa lelaki yang selalu ingin mengontrol kehidupan perempuan adalah suatu eksploitasi yang paling dasar dalam penindasan umat manusia (Tong 2009). Aksi-aksi massa yang dilakukan oleh Gerakan Femen di Ukraina sangat menggambarkan bahwa mereka menganut ideologi tersebut. Sumber ketidakadilan gender menurut feminisme radikal antara lain yaitu, pertama sistem penindasan yang dilakukan terhadap perempuan dengan adanya sistem patriarki yang senantiasa mendiskriminasikan perempuan. Kedua kontrol dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, justifikasi penindasan terhadap perempuan melalui hukum, agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, objektifikasi tubuh perempuan yang diperoleh melalui iklan-iklan, media massa, dan produksi industri lainnya, dan yang terakhir pengexploitasian perempuan melalui pornografi dan prostitusi (Judith Lorber 2001).

Dalam konteks spesifik di Ukraina, keberhasilan Gerakan Femen terlihat dari dampaknya dalam meningkatkan kesadaran mengenai isu gender dan hak-hak perempuan. Terlepas dari kontroversi seputar protes mereka yang bertelanjang

dada, tindakan ini telah menarik liputan media yang luas, perhatian publik, dan memicu diskusi besar tentang feminisme, gender, dan politik di Ukraina. Selain itu, aktivisme Femen telah berkontribusi pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, memberdayakan mereka untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mengadvokasi reformasi kebijakan yang mengatasi diskriminasi berbasis gender dan pelecehan seksual. Selain itu, Gerakan Femen juga proaktif dalam mengadvokasi reformasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Meskipun dampak langsung dari aktivisme mereka mungkin tidak selalu terlihat, kehadiran mereka di ruang publik dan tekanan yang mereka berikan melalui protes telah mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Misalnya, advokasi mereka telah mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih serius untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan diskriminasi berbasis gender.

Gerakan Femen di Ukraina telah lama mengadvokasikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, jauh sebelum Ukraina mengadopsi National Action Plan atau NAP Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016. Hal ini merupakan ironi yang menarik, mengingat bahwa Femen terkenal dengan aksi-aksi provokatif mereka yang menentang norma-norma gender dan patriarki. Meskipun Femen tidak secara langsung terlibat dalam proses penyusunan NAP 1325 Ukraina, aktivisme mereka telah membantu meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu gender dan membuka jalan bagi adopsi kebijakan yang lebih progresif. Namun, penting untuk dicatat bahwa NAP 1325 Ukraina diadopsi di tengah konflik di Donbass, yang berdampak signifikan pada perempuan dan anak

perempuan di wilayah tersebut. Konflik ini telah memperburuk ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan, dan telah menjadi tantangan yang signifikan bagi implementasi NAP 1325. Menyadari dampak konflik terhadap perempuan dan anak perempuan, pemerintah Ukraina mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan mereka yaitu pada tahun 2016, Ukraina mengadopsi National Action Plan (NAP) 1325.

National Action Plan (NAP) 1325 Ukraina 2016-2020 mewakili inisiatif penting pemerintah yang bertujuan menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Rencana komprehensif ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi perempuan di Ukraina dalam pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, dan rekonstruksi pasca-konflik. Ukraina telah melakukan kepatuhan terhadap resolusi UNSCR 1325 dengan mengadopsi hal tersebut ke tingkat nasional melalui National Action Plan (NAP) pada tahun 2016 bulan Februari untuk periode 2016-2020. Dalam kurun waktu dua tahun setelah pecahnya konflik bersenjata di negara bagian Donbass, menjadikan Ukraina sebagai negara pertama dengan status berkonflik yang mengadopsi UNSCR 1325. Pengaruh besar oleh banyaknya organisasi regional yang mempengaruhi pengadopsian UNSCR 1325 oleh Ukraina yang kemudian menumbuhkan kesadaran tentang hak dan perlindungan perempuan dalam situasi konflik melalui agenda Women, Peace, and Security (Ulzana dan Fendy, 2021). Dokumen ini menguraikan langkah-langkah konkrit mengenai peningkatan partisipasi oleh perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan, seperti meningkatkan

keterlibatan mereka dalam negosiasi perdamaian dan memastikan keterwakilan mereka dalam memantau dan mengevaluasi implementasi perjanjian perdamaian. Selain itu, NAP menekankan integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan keamanan nasional, memberikan pelatihan bagi personel militer dan penegak hukum untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan unik perempuan dalam operasi keamanan.

Sepanjang masa pelaksanaan NAP 1325 Ukraina 2016-2020, pemerintah berkomitmen membina kemitraan dengan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dalam bidang keamanan dan perdamaian. Hal ini tidak hanya mencakup memastikan akses perempuan terhadap layanan keamanan dan keadilan yang setara, tetapi juga mengatasi isu-isu yang lebih luas seperti kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan memprioritaskan inklusi perempuan dan perspektif mereka dalam upaya pembangunan perdamaian, NAP berupaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, memperkuat peran perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Ukraina.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana gerakan Femen mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina melalui protes dan manuver-manuver yang terkenal secara global. Berawal dari aksi protes feminis kontroversial di Ukraina yang muncul tahun 2008, gerakan Femen telah menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran mengenai isu gender dan hak-hak

perempuan secara internasional. Memanfaatkan demonstrasi telanjang dada dan strategi media online yang inovatif, Femen telah berhasil menarik perhatian global terhadap isu-isu seperti pelecehan seksual, diskriminasi gender, dan penindasan terhadap perempuan. Melalui partisipasinya dalam acara-acara penting dan aksi protes di negara lain, Femen telah menciptakan tekanan politik yang signifikan terhadap pemerintah Ukraina untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kebijakan luar negerinya. Melalui analisis mendalam mengenai peran dan dampak Femen dalam advokasi melalui aksi massa yang mereka lakukan serta pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Ukraina, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana gerakan ini telah membentuk narasi dan agenda feminis dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang maka penulis menjabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana upaya aktivisme Gerakan Femen dalam mempengaruhi Pemerintahan Ukraina dalam pengadopsian NAP 1325 atau *National Action Plan*?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menganalisis peran atau aktivisme Gerakan Femen di Ukraina dalam mempengaruhi pengadopsian NAP 1325 atau *National Action Plan* Pemerintahan Ukraina sebagai perwujudan kesetaraan gender.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan Gerakan Femen di Ukraina guna mempengaruhi pengadopsian NAP 1325 atau *National Action Plan* Pemerintahan Ukraina.

b. Mengidentifikasi implikasi yang terjadi atas aktivisme Gerakan Femen dalam mempengaruhi Pemerintahan Ukraina mengadopsi NAP 1325 atau *National Action Plan* dalam perwujudan kesetaraan gender.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan penelitian ini yang harus dicapai.

Berikut kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang aktivisme feminis dan perannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan perdamaian. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang aktivisme feminis dan perannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta memobilisasi jaringan advokasi transnasional. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang bagaimana aktivisme feminis dapat menantang norma-norma gender yang patriarkal dan mendorong perubahan sosial melalui tekanan global. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang *Transnational Advocacy Network* (TAN) dan implementasinya dalam advokasi kebijakan di Ukraina, penelitian ini menunjukkan bagaimana kerangka TAN dapat digunakan untuk menganalisis peran gerakan feminis dalam menekan pemerintah dan

organisasi internasional agar lebih responsif terhadap isu gender. Bagi pemerhati isu-isu kesetaraan gender dalam konteks global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Gerakan Femen menggunakan strategi transnasional untuk mempengaruhi kebijakan NAP 1325 Ukraina melalui kampanye media, aksi simbolik, dan tekanan internasional menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru bagi aktivis feminis dan organisasi perempuan di Ukraina dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan perdamaian. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan taktik yang lebih efektif untuk aktivisme feminis. Penelitian ini pula dimaksudkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan pentingnya perdamaian, serta digunakan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perdamaian, dan untuk mendorong aksi kolektif untuk perubahan.

1.5 Kerangka Teoritis

Penelitian ini bertumpu pada literatur penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitan. Literatur penelitian terdahulu akan memperdalam pemahaman mengenai masalah yang ada pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa literatur penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan dapat dijadikan acuan atau landasan pada penelitian ini:

1.5.1. Studi Literatur

Dalam jurnal *Performing Protest: Femen, Nation, Protest and the Marketing of Resistance* oleh Jessica Zychowicz (2015) menjelaskan berbagai sudut pandang mengenai kelompok aktivis Femen secara spesifik. Secara simbolis, pertunjukan Femen terbentang pada dua bidang yang saling bersinggungan: sebagai tinjauan retrospektif yang sinis terhadap jebakan Revolusi Oranye, dan sebagai permainan kata pada feminisme yang, melalui peragaan kontroversial tubuh perempuan oleh kelompok ini, mengekspos mitologi budaya mendasar yang membedakan perempuan dari laki-laki, dan Timur dari Barat, dalam wacana tandingan yang menandakan kemajuan secara berbeda.

Pergeseran kelompok ini baru-baru ini ke citra "sextremis" dan internasionalisasi mereka di ruang virtual telah memperluas politik Femen dari komentar tentang hak-hak perempuan Ukraina, menjadi perdebatan global tentang makna istilah feminisme. Kesimpulan dari jurnal ini adalah membahas bagaimana kelompok Femen ini bergerak sebagai aktivisme kritis dengan menggunakan sindiran dan pertunjukan kontroversial untuk menyoroti isu-isu gender dan sosial politik. Kemudian aksi mereka menantang media massa, otoritas negara, dan konsep identitas nasional. Mereka mengkritik Revolusi Oranye Ukraina dan mempertanyakan kemajuan yang didapatkan perempuan. Femen juga bergerak sebagai komoditas, dimana strategi mereka memanfaatkan estetika populer dan sensualitas untuk menarik perhatian. Terdapat resiko mereka terlalu fokus pada citra dan pemasaran sehingga pesan mereka melemah. Pembahasan memperingatkan agar kritik terhadap Femen tidak jatuh pada sikap merendahkan

terhadap aktivisme dari negara berkembang. Secara keseluruhan, pembahasan ini mengajak pembaca untuk melihat Femen secara kompleks. Mereka adalah aktivis dengan kritik yang tajam, namun cara penyampaian mereka juga memiliki sisi komersial yang patut dipertimbangkan.

Jurnal *Activists Beyond Borders* oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998) membahas bagaimana jaringan advokasi transnasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan domestik dan internasional melalui strategi politik informasi, simbolik, leverage, dan akuntabilitas. Jaringan ini muncul ketika kelompok domestik mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan pemerintahnya, sehingga mencari dukungan dari aktor internasional untuk menekan pemerintah mereka sendiri, yang dikenal sebagai *boomerang pattern*.

Dengan menganalisis berbagai kasus historis, seperti gerakan anti-perbudakan, hak pilih perempuan, kampanye hak asasi manusia di Amerika Latin, serta gerakan lingkungan terhadap deforestasi di Amazon dan Malaysia, jurnal ini menunjukkan bagaimana jaringan advokasi transnasional dapat memperkuat gerakan sosial di tingkat global. Meskipun demikian, efektivitas jaringan ini bervariasi tergantung pada struktur politik domestik, kerentanan negara target terhadap tekanan internasional, serta tantangan dalam mempertahankan momentum dan memastikan keterlibatan aktor lokal. Kritik juga muncul terhadap ketergantungan yang tinggi pada aktor internasional, yang berisiko melemahkan inisiatif lokal. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa jaringan advokasi transnasional memiliki dampak signifikan dalam mengubah kebijakan

dan meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu penting, terutama dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan, dan kesetaraan gender.

Kemudian pada jurnal *Penolakan Greenpeace Thailand dalam Pembangunan PLTU Batu Bara Krabi 2013-2018* oleh Muhammad Royhan Cendikia dijelaskan secara mendalam mengenai bentuk advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace Thailand dalam menolak pembangunan PLTU di Provinsi Krabi, Thailand. Proyek pembangunan PLTU ini diproyeksikan akan memiliki kapasitas 870 megawatt dan merupakan bagian dari rencana jangka panjang *Power Development Plan Thailand 2010–2030*. Proyek ini menuai banyak penolakan dari masyarakat lokal, organisasi lingkungan, serta komunitas internasional karena dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini secara khusus menggunakan kerangka analisis *Transnational Advocacy Network (TAN)* yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink. Fokus utama penelitian ini adalah pada empat tipologi taktik TAN yaitu: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, sebagai alat untuk menganalisis strategi advokasi Greenpeace Thailand.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan Greenpeace Thailand dan jaringannya dalam menggagalkan proyek PLTU batu bara Krabi membuktikan efektivitas dari taktik-taktik TAN. Taktik *accountability politics* dinilai sebagai yang paling berdampak karena berhasil menekan aktor target yaitu Pemerintah Thailand untuk mengubah kebijakan. Studi ini juga menegaskan bahwa organisasi non-pemerintah meskipun memiliki sumber daya terbatas, tetap mampu memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan perubahan

kebijakan, terutama bila didukung oleh jaringan transnasional yang kuat dan terorganisir.

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul Implementasi UNSCR 1325 tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass oleh Pemerintah Ukraina Ulzana Habfie dan Fendy Eko Wahyudi (2021) menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasian UNSCR 1325 yaitu dengan produk NAP 1325 yang dilakukan oleh Ukraina. Penerapan UNSCR 1325 tahun 2000 yang dilakukan Ukraina baru terlaksana dalam kurun waktu 16 tahun setelah resolusi disahkan, yaitu pada tanggal 24 Februari 2016 dengan mulai berlaku dari 2016 sampai 2020. NAP 1325 Ukraina dikeluarkan oleh *Ministry of Social Policy* dan pelaksanaannya melibatkan kementerian lainnya yang memiliki korelasi dengan landasan NAP serta bertanggung jawab dalam pengimplementasiannya. NAP 1325 Ukraina mencakup 10 agenda, 69 indikator, dan 14 tindakan dalam hal ini, implementasi ini juga melibatkan aktor sub-nasional atau otoritas lokal serta masyarakat sipil. Pengimplementasian UNSCR 1325 didasarkan pada 4 pilar yaitu *participation, prevention, protection, dan relief & recovery*. Namun Ukraina memutuskan untuk penyesuaian dengan menambahkan dua pilar dalam tambahan yaitu koordinasi dan pemantauan. Oleh karena itu, agenda rencana aksi tersebut akan disajikan berdasarkan 4 pilar UNSCR 1325 yakni partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan rehabilitasi, serta 2 pilar tambahan yaitu koordinasi dan pemantauan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah adopsi UNSCR 1325 oleh pemerintah Ukraina pada tingkat nasional melalui *National Action Plan* (NAP) 1325 yang disahkan

pada 24 Februari 2016. NAP ini merupakan salah satu upaya pemerintah Ukraina guna mewujudkan kesetaraan gender dan perhatian khusus kepada perempuan.

Keempat penelitian tersebut cukup memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis mengenai analisis aktivisme yang dilakukan oleh Gerakan Femen di Ukraina menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas maka penulis akan menggabungkan beberapa intisari dari jurnal tersebut dan menjadikannya dalam bentuk penelitian yang terbaharui yaitu guna menganalisis bagaimana Gerakan Femen dapat mempengaruhi NAP 1325 atau *National Action Plan* di Ukraina menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Konsep *Transnational Advocacy Network* atau TAN pertama kali diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink dalam buku mereka *Activists Beyond Borders* (1998) sebagai sebuah kerangka untuk memahami bagaimana aktor-aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok masyarakat sipil, kelompok sosial serta individu yang memiliki kepentingan bersama, bekerja sama melintasi batas negara untuk mendorong perubahan sosial dan kebijakan. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa jaringan advokasi transnasional muncul sebagai respons terhadap hambatan komunikasi antara kelompok domestik dengan pemerintahnya, sehingga mereka mencari dukungan internasional untuk menekan negara dalam mengadopsi kebijakan tertentu, sebuah fenomena yang mereka sebut sebagai *boomerang pattern* (Keck & Sikkink, 1998). Sejarah perkembangan TAN dapat ditelusuri dari

gerakan-gerakan sosial global seperti kampanye penghapusan perbudakan, perjuangan hak pilih perempuan, hingga advokasi hak asasi manusia dan lingkungan pada abad ke-20 (Keck & Sikkink, 1998). Dengan memanfaatkan jaringan komunikasi global, TAN berhasil meningkatkan kesadaran internasional terhadap berbagai isu dan menekan negara serta lembaga internasional untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Jaringan advokasi transnasional menurut Keck & Sikkink (1998) beroperasi melalui empat strategi utama: *Information Politics*, yaitu penyebaran informasi yang kredibel untuk mempengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan; *Symbolic Politics*, yang menggunakan simbol, aksi, atau peristiwa penting untuk menarik perhatian global; *Leverage Politics*, yang melibatkan aktor internasional untuk menekan pihak yang lebih berkuasa; serta *Accountability Politics*, yaitu mendorong pemerintah dan organisasi internasional agar bertanggung jawab atas komitmen yang telah mereka buat. TAN seringkali berperan dalam isu-isu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, dan demokratisasi. Salah satu contoh konkret dari TAN adalah kampanye global menentang kekerasan terhadap perempuan yang mengandalkan tekanan internasional untuk mengubah kebijakan domestik di berbagai negara (Keck & Sikkink, 1998). Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan media sosial, jaringan advokasi transnasional menjadi semakin efektif dalam membangun solidaritas global dan mempengaruhi kebijakan melalui mobilisasi massa, kampanye daring, serta

diplomasi informal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat internasional (Keck & Sikkink, 1998).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memahami dan mendeskripsikan dampak advokasi serta perubahan kebijakan yang dihasilkan dari aksi Gerakan Femen sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional (TAN) dalam mendorong penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada periode 2016-2020. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tipologi taktik TAN yang dikembangkan oleh Keck & Sikkink (1998). *Femen*, sebagai gerakan feminis transnasional, menerapkan empat strategi utama dalam advokasi mereka, yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka. *Information Politics* digunakan untuk menyebarkan data dan fakta mengenai ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan, sementara *Symbolic Politics* dimanfaatkan melalui aksi protes yang provokatif untuk menarik perhatian global terhadap isu yang mereka angkat. Selain itu, *Leverage Politics* memungkinkan Gerakan Femen memanfaatkan dukungan dari aktor internasional guna menekan pemerintah Ukraina untuk mengadopsi kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan. Terakhir, *Accountability Politics* digunakan untuk meminta pertanggungjawaban negara atas komitmen internasionalnya, termasuk implementasi *National Action Plan* (NAP) berdasarkan Resolusi UNSCR 1325. Dengan menerapkan taktik-taktik ini, Gerakan Femen berperan sebagai katalis dalam jaringan advokasi transnasional yang berupaya memperkuat perlindungan hak-hak perempuan di Ukraina.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1. Tipologi Taktik *Transnational Advocacy Network*

Menurut Keck & Sikkink (1998), salah satu cara bagaimana TAN bekerja yaitu melalui empat tipologi taktik. Adapun penjelasan keempat tipologi taktik adalah sebagai berikut, Pertama *Information politics*, kemampuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan secara politis dan mampu digerakkan dengan cepat serta kredibel terhadap pihak atau tempat yang paling terdampak manfaatnya. Kedua *Symbolic politics*, kemampuan menyerukan simbol, tindakan, atau cerita dari suatu situasi agar masyarakat sadar dan mengetahui isu yang diperjuangkan. Ketiga *Leverage politics*, kemampuan untuk menyerukan aktor-aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi dimana aktor jaringan yang lebih lemah memiliki kemungkinan yang lebih kecil sebagai pengaruh. Keempat *Accountability politics*, upaya-upaya untuk mewajibkan aktor yang lebih kuat mengambil tindakan seperti mengubah kebijakan atau prinsip atas suatu isu yang sedang diperjuangkan.

2. Feminisme Radikal

Feminisme ini menyatakan bahwa keterasingan yang dialami oleh kaum perempuan disebabkan oleh faktor politik sehingga transformasi personal lebih pada tindakan radikal. Feminis aliran ini menyatakan, laki-laki yang terlalu mengontrol kehidupan perempuan merupakan bentuk penindasan yang paling dasar dalam penindasan umat manusia (Tong 2009). Pernyataan bahwa penindasan perempuan sebagai seorang perempuan lebih dasar dibandingkan

dengan bentuk penindasan lain terhadap manusia sangat sulit untuk dibongkar. Terdapat tiga aspek yang dapat dilihat dari mana perempuan itu ditindas. Pertama, melalui aspek sejarah perempuan merupakan kelompok pertama yang tertindas. Kedua, penindasan perempuan merupakan penindasan yang menyebar luas, dan sering terjadi secara nyata di setiap kelompok masyarakat yang ada. Ketiga, penindasan perempuan merupakan bentuk penindasan yang sukar untuk dihapuskan dan tidak dapat dihilangkan dengan penggantian status sosial lainnya seperti peniadaan kelas-kelas masyarakat (Alison Jaggar dan Paula Rothenberg 1984). Feminisme radikal menyatakan bahwa akar dari seluruh bentuk penindasan manusia terletak pada dominasi laki-laki terhadap perempuan, yang muncul dalam bentuk kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan (Tong, 2009: 94).

Dominasi ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga terinternalisasi secara historis dan kultural sehingga menempatkan perempuan sebagai kelompok pertama dan paling luas yang tertindas. Alison Jaggar dan Paula Rothenberg (1984) menjelaskan bahwa penindasan perempuan dapat dilihat dari tiga dimensi: pertama, perempuan merupakan kelompok pertama yang mengalami penindasan secara historis; kedua, penindasan terhadap perempuan terjadi secara global dan dalam setiap masyarakat; dan ketiga, penindasan tersebut bersifat melekat dan sulit dihapuskan bahkan jika struktur kelas sosial diganti.

Dalam kerangka ini, pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa memberi kerangka konseptual yang mendukung argumen feminisme radikal. Bagi Foucault, kuasa bersifat menyebar (*power as everywhere*) dan tidak hanya dimiliki oleh pihak dominan, tetapi juga beroperasi dalam tubuh dan subjek yang

didominasi (Foucault, 1977). Melalui konsep teknologi kuasa, ia menjelaskan bahwa tubuh perempuan didisiplinkan secara sosial untuk menjadi “tubuh patuh” (*docile bodies*) melalui norma-norma domestik, medis, dan agama. Foucault juga membagi analisis efek kekuasaan menjadi tiga yaitu, *surveillance and biopower* yakni pengawasan dan pengendalian terhadap tubuh individu dan populasi kedua *where there is power, there is resistance*, bahwa setiap kuasa selalu diiringi resistensi, dan ketiga *sexual identity and regimes of truth/power* bahwa identitas seksual dikonstruksi melalui rejim wacana dan kekuasaan (Foucault, 1980).

Dalam pengaruhnya terhadap teori feminis kontemporer, Judith Butler mengembangkan politik identitas berdasarkan teori relasi kuasa Foucault. Butler berargumen bahwa identitas gender dan seksualitas bukanlah entitas tetap, melainkan produk konstruksi sosial dan performativitas yang dibentuk oleh kuasa melalui tubuh dan bahasa (Butler, 1990). Karena itu, perbedaan identitas seksual menjadi dasar utama politik identitas (*identity politics*) dalam masyarakat modern. Politik ini yang dalam istilah Foucault disebut biopolitik tidak hanya membingkai tubuh secara wacana, tetapi juga menciptakan diferensiasi sosial yang dirasakan secara material. Dalam konteks ini, feminisme radikal dan teori relasi kuasa tidak saling bertentangan, tetapi saling memperkuat: feminisme mengungkap struktur dominasi patriarkal, sementara Foucault menjelaskan cara dominasi tersebut dijalankan dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Social Movement*

Konsep *social movement* menurut Donatella della Porta dan Mario Diani mencerminkan proses sosial kolektif yang melibatkan konflik, jaringan, dan identitas kolektif. Gerakan sosial didefinisikan sebagai aksi bersama dari

berbagai aktor yang memiliki tujuan bersama, terlibat dalam hubungan konflik terhadap pihak yang dianggap lawan, serta memiliki bentuk keterikatan melalui jaringan informal yang terus-menerus dipelihara. Identitas kolektif menjadi komponen esensial yang membedakan gerakan sosial dari protes sementara, karena menciptakan rasa keterhubungan dan komitmen yang berkelanjutan di antara para pelaku gerakan (Della Porta & Diani, 2006 p20–22). Sementara itu, *collective action* dipahami sebagai bentuk tindakan yang dilakukan secara bersama oleh sekelompok individu dalam upaya mengejar tujuan bersama yang bersifat kolektif dan tidak bisa dimiliki secara privat. Aksi kolektif menjadi dasar bagi pembentukan gerakan sosial, tetapi tidak semua aksi kolektif otomatis menjadi gerakan sosial. Misalnya, kampanye amal atau kerja bakti bukanlah gerakan sosial jika tidak terdapat dimensi konflik atau konstruksi identitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aksi kolektif menjadi elemen dasar dalam gerakan sosial yang dimaknai lebih luas dalam kaitannya dengan struktur sosial dan dinamika kekuasaan (Della Porta & Diani, 2006 p19–20).

Della Porta dan Diani menegaskan bahwa hubungan antara *collective action* dan *social movement* bersifat inheren. Gerakan sosial merupakan wujud kompleks dari aksi kolektif yang terorganisasi, dibingkai secara kultural, dan terhubung dengan sistem nilai, emosi, serta solidaritas sosial. Gerakan sosial memperluas makna dari aksi kolektif dengan menambahkan elemen ideologi, strategi mobilisasi, serta hubungan jangka panjang antara individu, organisasi, dan institusi sosial. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner menjadi

penting untuk memahami kompleksitas dinamika gerakan sosial kontemporer (Della Porta & Diani, 2006 p21–23).

1.6.2. Operasional Konsep

1. Tipologi Taktik *Transnational Advocacy Network*

Pertama *Information politics*, upaya dari Gerakan Femen dalam menggunakan media global untuk menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dalam konflik. Mereka sering mengecam kebijakan negara yang dianggap sekadar simbolis tanpa dampak nyata terhadap perempuan di zona konflik. Kedua *Symbolic Politics*, aksi-aksi topless Gerakan Femen menargetkan lembaga-lembaga yang mereka anggap sebagai simbol patriarki dan represi, termasuk militer dan pemerintah Ukraina. Ketiga *Leverage Politics*, Mereka menargetkan organisasi internasional seperti UN Women dan Uni Eropa, meminta agar dukungan terhadap Ukraina dikaitkan dengan implementasi nyata dari Resolusi 1325. Keempat *Accountability Politics*, Gerakan Femen menuntut pemerintah Ukraina untuk lebih transparan dalam implementasi NAP 1325, khususnya dalam perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di wilayah konflik.

2. *National Action Plan* (NAP)

National Action Plan (NAP) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah NAP yang berdasarkan pada Resolusi UNSCR 1325 sebagai dokumen strategi tingkat nasional yang menguraikan pendekatan dan tindakan pemerintah untuk melokalisasi aksi pada isu perempuan, perdamaian dan keamanan. Dokumen ini menguraikan tujuan dan kegiatan yang dilakukan negara, baik di tingkat

domestik maupun internasional, untuk mengamankan hak asasi perempuan dalam situasi konflik; mencegah konflik bersenjata dan kekerasan, termasuk terhadap perempuan dan anak perempuan; dan memastikan partisipasi yang berarti dari perempuan dalam perdamaian dan keamanan. NAP 1325 Ukraina 2016-2020 yang akan menjadi suatu objek dimana Gerakan Femen berhasil untuk mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut.

3. Feminisme Radikal

Feminisme radikal yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan landasan ideologis dari tindakan Gerakan Femen di Ukraina. Feminisme ini melihat akar ketidakadilan gender bukan sekadar dalam relasi sosial yang bias, melainkan pada struktur patriarki yang menindas perempuan secara sistemik. Menurut Judith Lorber (2001), bentuk penindasan tersebut mencakup dominasi laki-laki atas perempuan, justifikasi kekuasaan melalui institusi sosial seperti hukum dan agama, serta objektifikasi tubuh perempuan dalam media, iklan, dan industri pornografi. Gerakan Femen memperlihatkan penerapan langsung dari pandangan ini, khususnya melalui aksi-aksi teatrikal topless yang menyuarakan perlawanan terhadap simbol-simbol penindasan yang dilembagakan oleh negara, agama, dan sistem kapitalistik. Aksi-aksi ini bukan sekadar tindakan visual, melainkan ekspresi ideologis dari keyakinan bahwa tubuh perempuan harus direbut kembali dari kontrol patriarki (Lorber, 2001).

Konsep relasi kuasa dari Michel Foucault memperluas dimensi pemahaman feminisme radikal, dengan menunjukkan bagaimana penindasan tidak hanya bersifat makro-struktural, tetapi juga bekerja melalui disiplin

tubuh dan produksi wacana. Dalam kerangka ini, Gerakan Femen dapat dipahami sebagai representasi dari subjek yang terdominasi yang memproduksi resistensi terhadap *regimes of truth* yang dikendalikan oleh institusi seperti gereja, negara, dan media. Femen menggunakan tubuh perempuan, yang oleh Foucault disebut sebagai locus utama biopolitik dan *surveillance*, sebagai instrumen gangguan terhadap teknologi kuasa yang selama ini mendisiplinkan perempuan ke dalam peran yang “sopan”, “pasif”, dan “domestik” (Foucault, 1977). Aksi topless mereka bukan sekadar bentuk provokasi, tetapi medium artikulasi counter-power untuk mendekonstruksi logika representasi patriarkal yang menyematkan nilai moral tertentu pada tubuh perempuan (Foucault, 1980).

Dalam hal ini, terjadi difusi pemikiran antara feminisme radikal dan relasi kuasa Foucauldian. Jika feminisme radikal menjelaskan struktur penindasan patriarki dan tuntutan pembebasan perempuan dari kontrol maskulin, maka teori kuasa Foucault menjelaskan bagaimana kontrol tersebut dijalankan melalui mekanisme mikropolitik dan produksi identitas. Aksi-aksi Femen seperti penebangan salib Ortodoks sebagai simbol kekuasaan agama patriarkal atau kritik terhadap pornografi dan prostitusi adalah manifestasi langsung dari pembongkaran *regimes of truth* tentang identitas seksual dan feminin yang didiktekan oleh kuasa. Dalam hal ini, pemikiran Judith Butler juga relevan, karena mengembangkan konsep bahwa identitas seksual merupakan hasil konstruksi sosial yang didukung oleh struktur kuasa dan diskursus dominan (Butler, 1990). Femen menolak norma heteronormatif dan feminitas

konvensional, dan sebaliknya memproduksi bentuk-bentuk resistensi identitas yang membebaskan.

Pemerintah Ukraina, sebagai pemilik biopower dalam terminologi Foucault, berada dalam posisi hegemonik yang dikritik oleh Femen. Negara dianggap telah gagal menciptakan ruang aman bagi perempuan, terutama dalam konteks pasca-konflik, serta belum serius mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan. Melalui aksi-aksi demonstratif yang disiarkan secara internasional, Femen memproduksi *spectacle resistance* yang membongkar struktur kuasa baik formal (negara) maupun informal (budaya patriarkal). Dalam konteks ini, penerapan *National Action Plan* (NAP) 1325 oleh Pemerintah Ukraina tahun 2016 dapat dilihat sebagai hasil dari tekanan politik dan simbolik yang dilakukan oleh gerakan seperti Femen. Tekanan tersebut membongkar *status quo* dan membuka ruang bagi artikulasi baru atas tubuh, suara, dan agensi perempuan dalam ruang publik dan kebijakan negara (Council of Europe, 2021).

4. *Social Movement*: Gerakan Reformatif

Gerakan Femen merupakan manifestasi konkret dari *social movement* modern yang menunjukkan tiga karakteristik utama seperti yang dijabarkan oleh Della Porta dan Diani: keterlibatan dalam konflik sosial-politik, terbentuknya jaringan informal lintas negara, serta konstruksi identitas kolektif yang konsisten. Femen menggunakan tubuh perempuan sebagai sarana ekspresi politik untuk melawan kekuasaan negara, agama, dan patriarki yang menormalisasi subordinasi perempuan. Aksi topless mereka merupakan bentuk dari *symbolic collective action* yang bersifat disruptif dan konfrontatif

terhadap struktur nilai yang dominan (Shevchenko, 2013; Della Porta & Diani, 2006: 20–21). Secara operasional, *collective action* dalam gerakan Femen diwujudkan melalui aksi performatif yang dikurasi secara strategis untuk menarik perhatian media internasional dan membangun solidaritas lintas negara. Femen membangun jaringan informal dengan aktivis di berbagai kota dunia, tanpa bergantung pada struktur organisasi yang birokratis. Mereka memanfaatkan media sosial, visual simbolik, dan momen protes sebagai bentuk taktik mobilisasi kolektif (Zychowicz, 2015).

Gerakan ini berusaha mencari perubahan yang bersifat terbatas dalam sistem politik, ekonomi, atau kehidupan sosial suatu negara. Dengan sifatnya yang terbatas, gerakan ini akan memfokuskan diri pada isu yang dia perjuangkan saja (Snow & Soule, 2010). Gerakan Femen dapat dikategorikan sebagai gerakan reformatif karena fokus utama mereka adalah menuntut penyesuaian kebijakan negara dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan, bukan menggulingkan sistem pemerintahan yang ada (Shevchenko, 2013).

Meskipun Femen dikenal dengan metode aksi yang radikal dan teatrikal seperti protes topless di ruang publik atau simbol-simbol keagamaan yang ditantang secara terbuka tujuan utama Gerakan Femen tetap berada dalam kerangka perubahan kebijakan institusional, seperti desakan agar pemerintah Ukraina mengadopsi *National Action Plan* (NAP) 1325 untuk melindungi perempuan di masa konflik dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Tuntutan ini bersifat spesifik dan tidak diarahkan untuk merombak tatanan

kekuasaan secara menyeluruh, melainkan mendorong perbaikan dari dalam melalui tekanan sosial, budaya, dan hukum.

1.7. Argumen Penelitian

Gerakan Femen yang terkenal dengan aksi massa yang radikal tentu tidak dengan alasan yang begitu saja, mereka ingin menuntut mengenai kesetaraan gender melalui tiga hal utama. Pertama yaitu mereka menentang diktatorisme dimana mereka menentang pemimpin otoriter dan rezim represif di seluruh dunia. Kedua, lembaga keagamaan seperti mengkritik pengaruh agama yang dianggapnya patriarki dan misoginis. Ketiga industri seks, Femen menentang perdagangan seks dan eksploitasi seksual perempuan. Di Ukraina sendiri telah mengadopsi NAP 1325 pada tahun 2016-2020, yang berisi mengenai bagaimana partisipasi wanita itu dapat diprioritaskan dan dapat diikutsertakan dalam kebijakan domestik Ukraina. Gerakan Femen sendiri telah meluncurkan aktivisme mereka sedari dulu yaitu awal terbentuknya 2008, seiring berjalannya waktu Femen telah meningkatkan awareness atau kesadaran publik bahwasanya kesetaraan gender di Ukraina itu masih belum dijunjung tinggi oleh negaranya. Maka dari itu dengan pengadopsian NAP 1325 mengimplikasikan bahwa manuver-manuver yang telah dilakukan oleh Femen itu membuahkan hasil yang berdampak positif dalam perwujudan kesetaraan gender. Dengan menggunakan konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dapat ditinjau bagaimana Gerakan Femen itu mempengaruhi terbentuknya NAP 1325 di Ukraina.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris serta memiliki tujuan guna memahami fenomena sosial melalui gambaran dan menambah pemahaman mendalam (Masyhuri, 2011). Teknik yang biasa digunakan dalam metode ini, seperti wawancara, kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, serta studi kasus. Peneliti akan menggunakan teknik analisis konten serta studi kasus. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis makna teks, gambar, atau bentuk komunikasi lainnya (Bryman & Burgess, 2009). Dalam penelitian ini, analisis konten akan digunakan untuk menganalisis dokumen resmi terkait Gerakan Femen di Ukraina, seperti situs web, media sosial, dan artikel berita. Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti secara mendalam satu atau beberapa kasus tertentu (Yin, 2018). Dalam penelitian ini, studi kasus akan digunakan untuk menganalisis satu atau beberapa aksi protes Femen di Ukraina.

1.8.2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.8.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Dalam konteks penelitian ini subjek penelitian adalah Gerakan Femen di Ukraina, NAP 1325 Ukraina 2016-2020, dan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN).

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan, diproses, ataupun telah diterbitkan oleh orang lain (Hasan, 2024). Jenis data seperti ini memberikan kemudahan bagi para peneliti karena memberikan alternatif yang bisa memberikan penghematan biaya dan efisiensi untuk mengumpulkan data-data baru.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini kan menggunakan teknik reduksi data. Reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyederhanakan, memfokuskan, dan memurnikan data yang dikumpulkan untuk menghasilkan data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis (Miles & Huberman, 1994). Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan biasanya berlimpah dan kompleks. Reduksi data merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan

analisis data, khususnya ketika penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Teknik ini biasanya melibatkan beberapa teknik untuk menyederhanakan atau meringkas data sehingga nantinya lebih mudah untuk dilakukan analisis dan menarik kesimpulan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memadatkan dan mengatur data dari jumlah yang besar ke dalam bentuk yang dapat dikelola serta diinterpretasikan (Bhandari, 2020).

1.8.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, penelitian ini akan menggunakan teknik reduksi data. Menurut Strauss & Corbin (1990), reduksi data dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, membaca dan menelaah data dengan peneliti membaca dan menelaah data secara cermat untuk memahami maknanya. Kedua, mengidentifikasi tema dan kategori dengan peneliti mengidentifikasi tema dan kategori yang muncul dari data. Ketiga, membuat kode dimana peneliti membuat kode untuk setiap tema dan kategori. Keempat, mengelompokkan data dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan kode yang telah dibuat. Kelima, mereduksi data dimana peneliti mereduksi data dengan menyederhanakan, memfokuskan, dan memurnikan data yang telah dikelompokkan.

1.8.7. Kualitas Data

Penggunaan data sekunder dalam penelitian harus selalu memastikan kualitas, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian. Cara untuk memastikan bahwa data yang didapat berkualitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kualitas data diukur dengan beberapa kriteria. Pertama credibility, data yang

kredibel adalah data yang dapat dipercaya dan meyakinkan. Kredibilitas data dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti triangulasi data, member checking, dan auditabilitas. (Guba & Lincoln, 1989). Kedua transferability, data yang transferable adalah data yang dapat diterapkan pada konteks lain. Transferabilitas data dapat dicapai dengan memberikan deskripsi yang kaya dan mendalam tentang penelitian dan konteksnya. (Merriam, 1988). Ketiga, dependability, data yang andal adalah data yang dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama jika penelitian dilakukan lagi dengan cara yang sama. Keandalan data dapat dicapai dengan mendokumentasikan proses penelitian secara detail dan sistematis. (Creswell & Creswell, 2018).